

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Publik di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2018-2020

¹Salsiya Peparing Gusti, Herabudin, Salamatul Afiyah

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; salsiyapeparinggusti@gmail.com

Received: July 28, 2022; In Revised: August 05, 2022; Accepted: August 12, 2022

Abstract

Regional Financial Management is managed in an orderly, effective, efficient, economical, transparent and accountable manner. Financial management that has not been optimal has an effect on the low accountability of the program targets implemented. The Bandung City Social and Poverty Alleviation Service has problems in managing regional finances that are not optimal, which then affects the accountability of the implementation of program targets from 2018-2020. The purpose to measure how much influence regional financial management has on public accountability in the Bandung City Social and Poverty Alleviation Service in 2018-2020. The method used quantitative approach with a associative method. The collection of information and data through questionnaires distributed to employees at the Social Service of Bandung City. The population is all employees at the Bandung City Social Service. The sample used simple random technique. The analysis used Spearman rank correlation analysis, simple regression analysis, coefficient of determination, t test and data testing in this study using SPSS Version 25 software. The result is a significant effect positive and significant relationship between regional financial management and public accountability. The magnitude of the influence of regional financial management on public accountability at the Bandung City Social Service is 61% while the remaining 39% is influenced by other factors not examined by the author.

Keywords: Local Government, Regional Financial Management, Public Accountability

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah memerintahkan bahwa Pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam mengelola keuangan daerah dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau dialokasikan. Yang disebut kewajiban pengelola pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah antara lain: a) Mengelola dana secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan; b) Sinkronisasi realisasi target rencana daerah dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan rencana pemerintah pusat; c) Sebagai pelaksanaan tugas pembantuan pemerintah daerah melaporkan realisasi pelaksanaan dalam hal pendanaan untuk urusan pemerintahan.

Implementasi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terutama yang terkait dengan Pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam PP ini disebutkan bahwa Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban wilayah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dievaluasi melalui segala bentuk harta benda yang dapat dijadikan barang milik daerah, dan ditetapkan setiap tahun kemudian dikelola secara sistematis oleh masing-masing wilayahnya.

Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup seluruh kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban, pelaporan dan pengawasan. (Yani, 2013). Pengelolaan Keuangan Daerah tidak lepas dari anggaran sektor publik, di mana menurut Mardiasmo (2018) aspek-aspek yang harus ada dalam anggaran sektor publik meliputi

: 1). Aspek Perencanaan, 2) Aspek Akuntabilitas Publik, dan 3) Aspek Pengendalian. Untuk mengelola sumber daya dengan baik dibutuhkan anggaran yang berdasar pada akuntabilitas yang diharapkan masyarakat untuk mencapai kinerja tersebut.

Dilihat dari ketidakmampuan pemerintah sebelumnya dalam memberikan pelayanan publik yang baik, sistem akuntabilitas diyakini mampu mengubah tatanan yang lebih terarah dan demokratis. Terselenggaranya pemerintahan yang bertanggung jawab dan pastinya terbuka kepada masyarakat akan membangun rasa kepercayaan masyarakat tentang program apa yang sedang direncanakan dan dilaksanakan. Jika sebuah kualitas informasi dikatakan merugikan masyarakat luas dan juga aparat terkait apalagi dalam hal pengambilan keputusan, maka informasi keuangan pemerintah daerah tersebut masih belum transparan kepada masyarakat.

Berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandung No 7 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, di mana pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi Keuangan daerah dikelola dengan prinsip-prinsip / azas-azas sebagai berikut: a. secara tertib; b. mematuhi undang-undang; c. efektif; d. efisien; e. ekonomis; f. transparan; g. bertanggung jawab; h. keadilan; i. kepatutan; dan j. menguntungkan masyarakat.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang berbunyi Dinas Sosial Kabupaten/Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial dan menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Maka Dinas Sosial Kota Bandung salah satu pengelola dana publik yang berorientasi langsung dibidang sosial harus mampu menyediakan informasi dana publik dengan akurat, tepat waktu, relevan, dan dapat dipercaya. Karena Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu berupa pelayanan umum dibidang partisipasi sosial dan pastinya berorientasi kepada masyarakat. Perlu adanya peningkatan kinerja pelayanan yang berakuntabilitas sebagai upaya pencapaian reformasi birokrasi agar salah satu tugas pokok dari Dinas Sosial Kota Bandung ini dapat dijalankan dengan optimal. Penelitian ini mengambil permasalahan dari data pengelolaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan di Dinas Sosial Kota Bandung lebih tepatnya dalam hal efektifitas penyerapan anggaran belanja yang belum optimal, hal ini menyebabkan masih rendahnya tingkat akuntabilitas publik.

Salah satu permasalahannya yaitu belum efektifnya penyerapan anggaran belanja antara anggaran dan realisasi yang telah direncanakan pada tahun 2018-2020, yang belum mencapai 95% sebagaimana persentase yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Dapat dilihat pada tabel 1 :

Tabel 1.

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	125.272.907.529	79.297.823.077	63,3
2019	48.519.781.846	40.015.398.196	82,47
2020	39.292.499.497	33.388.567.847	84,97
Jumlah	213.085.188.872	152.701.789.120	76,92

Sumber: LRA Belanja Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun Anggaran 2018-2020 (Data Diolah)

Tabel 1 menunjukkan bahwa, adanya realisasi anggaran belanja yang mengalami persentase cukup rendah dan kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2018-2020. Tahun 2018 persentase realisasi anggaran hanya mencapai 63,30% saja, di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 82,47%, lalu ditahun 2020 mengalami sedikit peningkatan menjadi 83,11%. Jika diakumulasikan setiap tahunnya realisasi anggaran belum mencapai 95% tetapi hanya mencapai 76,92% saja. Hal tersebut menjelaskan bahwa masih kurang optimalnya pengelolaan keuangan di Dinas Sosial Kota Bandung yang menyebabkan efektifitas penyerapan anggaran dan akuntabilitasnya masih rendah.

Selain itu permasalahan yang ditemukan di Dinas Sosial Kota Bandung berkaitan dengan akuntabilitas, hal ini tertera dari pencapaian target sasaran program tahun 2018-2020 yang telah ditetapkan belum mencapai target. Setiap tahunnya ada sasaran program yang belum mencapai target dapat dilihat dari beberapa tabel sasaran program dari tahun 2018-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.

Realisasi Per Sasaran Program Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun Anggaran 2018-2020

Tahun	Sasaran Program	Keuangan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	Meningkatkan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	53.397.166.267	44.651.938.542	83,62
	Meningkatnya pemenuhan hak dasar warga miskin	12.094.301.813	3.207.234.115	26,52
	Meningkatnya peran aktif PSKS	20.566.855.877	2.807.442.750	13,65
Total Keseluruhan		86.058.323.957	50.666.615.407	58,88
2019	Meningkatkan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	26.748.372.946	17.897.797.450	66,91
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar warga miskin	9.916.155.260	4.600.368.085	46,39
	Meningkatkan peran aktif potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1.499.728.900	1.237.139.850	82,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	12.117.305.379	10.743.170.152	88,66
Total Keseluruhan		50.281.562.485	34.478.475.537	68,57
2020	Meningkatkan Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	9.695.289.744	7.804.105.925	80,5
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu	9.019.807.615	6.722.300.587	74,5
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	10.276.530.266	9.568.849.279	93,1
Total Keseluruhan		28.991.627.625	24.095.255.791	83,11

Sumber: LAKIP Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung 2018-2020 (Diolah Peneliti)

Dilihat dari tabel 2, tahun 2018 target sasaran 1 Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) realisasinya mencapai 83,62% total per sasaran. Target sasaran 2 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hak dasar warga miskin realisasinya mencapai 26,52% total per sasaran. Lalu target sasaran 3 Meningkatkan peran aktif PSKS realisasinya hanya mencapai 13,65% total per sasaran. Dapat dilihat dari target sasaran di atas yang realisasinya sangat rendah yaitu pada target sasaran 3 Meningkatkan peran aktif PSKS yang hanya 13,65% saja.

Selanjutnya di tahun 2019, terlihat bahwa target sasaran Meningkatkan pelayanan terhadap masalah kesejahteraan sosial (PMKS) realisasinya sebesar 66,91% total per sasaran . Target sasaran 2 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin realisasinya sebesar 46,39%. Target sasaran 3 Meningkatkan peran aktif potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) realisasinya sebesar 82,50% total per sasaran. Target sasaran 4 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat realisasinya sebesar 88,66% total per sasaran. Dilihat dari target sasaran di atas yang paling rendah realisasinya adalah sasaran 2 yaitu Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin yang realisasinya hanya 46,39% saja.

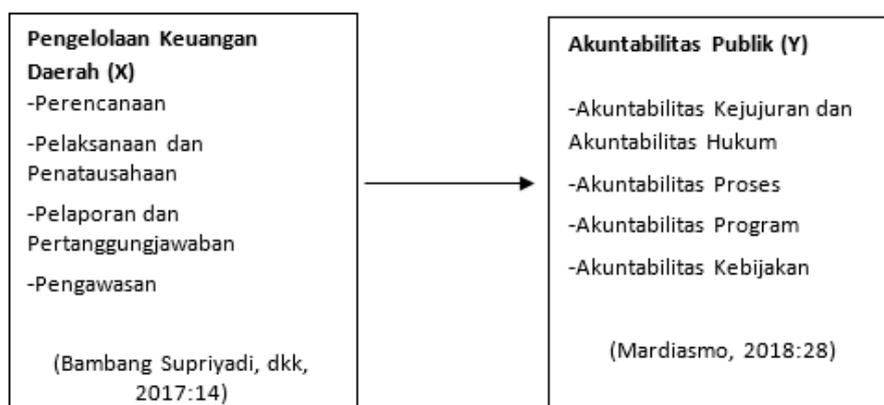
Berdasarkan tabel 2 ditahun 2020 terlihat bahwa target sasaran 1 Meningkatkan pemenuhan dasar warga miskin (PMKS) realisasinya sebesar 80,5% total per sasaran. Target sasaran 2 Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu realisasinya sebesar 74,5%. Target sasaran 3 Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung realisasinya sebesar 93,1%. Dilihat dari target sasaran di atas realisasi paling rendah ada ditarget sasaran 2 yaitu Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu realisasinya sebesar 74,5%.

Dilihat dari masalah tersebut, terlihat bahwa realisasi anggaran belanja tahun 2018-2020 semakin meningkat, namun target anggaran yang direncanakan semakin berkurang setiap tahunnya, di mana seharusnya target anggaran dan juga realisasi setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini sangat mempengaruhi tingkat akuntabilitas dari setiap sasaran program yang dianggarkan. Dapat dilihat dari tabel realisasi per sasaran program, ada beberapa program yang realisasinya sangat rendah. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Didapatkannya pengelolaan keuangan yang belum optimal yang kemudian berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaksanaan sasaran program dari tahun 2018-2020.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan masalah, yaitu Seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2018-2020. Dari rumusan masalah tersebut peneliti mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu mengukur seberapa besar pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2018-2020.

Gambar 1.

Kerangka Penelitian



Ha : Terdapat pengaruh positif dan signifikan pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik

Ho : Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik

Kuangan Negara tidak lepas dari Administrasi publik. Maka perlu terlebih dahulu mengetahui pengertian dari Administrasi publik. Administrasi publik Menurut Pasolong (2013) dalam (Rahmayanti, 2019) menjelaskan bahwa Administrasi Publik adalah kerja sama sekelompok orang atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melaksanakan tugas pemerintahan secara efisien dan efektif.

Permasalahan yang ada di Dinas Sosial Kota Bandung ini perlu diidentifikasi, maka diperlukan adanya Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik. Menurut Renyowijoyo (2013) dalam (Aprianto, 2017) mengatakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. Keuangan daerah dikelola dengan azas tertentu. Menurut Siregar (2017) keuangan daerah dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel, patuh pada undang-undang serta memperhatikan azas kewajaran, keadilan dan kepentingan masyarakat.

Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat siklus-siklus yang diperlukan agar dapat berjalan dengan optimal. Supriyadi, *et al* (2017) siklus pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Perencanaan

Dalam perencanaan keuangan daerah yang perlu diperhatikan adalah : a. Tujuan dan sasaran ditetapkan secara rinci dan jelas, manfaat dan hasil serta indikator kinerja yang ditetapkan dan yang ingin dicapai. b. Terhindar dari ketimpangan permasalahan antarwilayah, c. Meningkatkan kontribusi masyarakat dan tercapainya pemakaian sumber daya yang efektif, efisien, merata dan berkelanjutan.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

SKPD wajib menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang di dalamnya tersusun secara rinci klasifikasi jenis belanja, program serta kegiatan dan fungsinya lalu disertai dengan indikator setiap kinerjanya. Kepala daerah juga mempunyai kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya lalu diberikan kepada satuan kerja untuk segera dilaksanakan pengelolaannya. Manfaat pemisahan ini agar pembagian tugas dan wewenang menjadi jelas saat akan melaporkan dan juga bertanggung jawab dalam setiap satuan kerja. Semua itu dilakukan agar terlaksananya pengecekan dan keseimbangan dalam mengelola keuangan serta mendorong upaya meningkatkan profesionalitas dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan.

3. Pelaporan dan Pertanggung jawaban

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yaitu membuat laporan keuangan di mana laporan keuangan ini nantinya menjadi kriteria kinerja untuk dapat mempertanggung jawabkannya pada setiap akhir periode anggaran atas penggunaan keuangan daerahnya. Semua itu harus dan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah kemudian dilaporkan dan juga dipertanggung jawabkan.

4. Pengawasan

Setiap tahunnya dalam Pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan mengalami pengawasan dua kali, yaitu dari pihak Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan APIP dilakukan dalam tahun berjalan karena itu disebut *interim audit* sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal dilakukan setelah tahun berjalan disebut *post audit*.

Sebagai wujud akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah seluruh instansi pemerintahan pusat maupun daerah berkewajiban menyusun laporan. (Marcori ludani, 2015) Pengelolaan keuangan yang belum optimal berpengaruh pada rendahnya akuntabilitas dari sasaran program yang dilaksanakan. Berkaitan dengan akuntabilitas Mardiasmo (2018) mengungkapkan akuntabilitas publik adalah wali berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban, penyajian, pelaporan dan mengungkapkan segala kegiatan dalam ruang lingkup tugasnya kepada principal (delegator) yang memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.

Tilbury 2006, dalam Akbar (2014) dalam mengukur akuntabilitas di pemerintah daerah digunakan parameter keuangan dan kinerja sebagai indikator dari akuntabilitas. Dalam mengelola manajemen guna memastikan agar organisasi diatur dengan cara yang terbaik serta terpenuhinya pelayanan untuk para *stakeholders* merupakan peran yang signifikan dari indikator kinerja dalam akuntabilitas pemerintahan. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan akuntabilitas secara internal dan eksternal diperlukan pengukuran kinerja yang baik.

Organisasi sektor publik harus melakukan akuntabilitas publik yang terdiri dari dimensi-dimensi. Ellwood 1993, dalam Mardiasmo (2018) memaparkan terdapat empat dimensi akuntabilitas :

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Menghindari penyalahgunaan jabatan merupakan keterkaitan antara Akuntabilitas Kejujuran, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan penggunaan sumber dana publik dan juga adanya jaminan kepatuhan terhadap hukum dan juga peraturan lainnya.

2. Akuntabilitas Proses

Apakah tata cara yang direncanakan dalam menjalankan tugas sudah cukup optimal dari segi administrasi, kecukupan sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi.

3. Akuntabilitas program

Apakah tujuan yang direncanakan dan di tetapkan dapat tercapai atau tidak dan apakah memberikan hasil yang maksimal tapi tetap dengan biaya yang sangat minimal. Dan apakah ada program cadangan yang nantinya akan berpengaruh pada tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kemudian dilaporkan kepada DPR/DPRD dan juga akan diketahui oleh masyarakat luas, yang nantinya kebijakan tersebut dipertanggung jawabkan oleh pemerintah di pusat maupun daerah.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Rahmayanti (2019) dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung.” Penelitian ini menghasilkan pengaruh yang positif dari pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik di pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Siregar (2017) dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tahun 2014.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pengaruh yang tinggi dari pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas di Dinas Bina Marga dan Pengairan Bandung.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya di mana peneliti menggunakan teori variabel (x) Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Supriyadi, *et al.* (2017) dan teori variabel (y) Akuntabilitas Publik menurut Mardiasmo (2018). Selain itu penulis akan melakukan penelitian di Dinas Sosial Kota Bandung. Dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang diidentifikasi oleh peneliti yaitu penelitian asosiatif yang dilakukan melalui metode kuantitatif. Studi asosiatif menurut Sugiyono (2016) merupakan penelitian yang membutuhkan hubungan/interaksi antara dua variabel atau lebih. Peneliti menggunakan penelitian asosiatif untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Publik di Dinas Sosial Kota Bandung 2018-2020. Sedangkan pendekatan kuantitatif yaitu meneliti dua gejala atau lebih yang nanti data penelitiannya dapat berupa beberapa angka dan menggunakan analisis statistik.

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai di Dinas Sosial Kota Bandung berjumlah 71 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling* dengan teknik acak sederhana. Pendekatan yang diambil di teknik acak sederhana adalah rumus Slovin, dinyatakan dengan rumus:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

n = Unit Sampel (jumlah responden yang dibutuhkan)
 N = Populasi (jumlah atau ukuran populasi)
 e = Batas kesalahan yang ditoleransi (1%, 5%, 10%)

Dengan tingkat kesalahan (e) sebesar 10% (0,10) karena dianggap sudah cukup mewakili, artinya penulis yakin 90% hasil penelitian adalah benar. Jadi ukuran sampel dari populasi untuk dijadikan responden adalah:

$$n = \frac{71}{1 + 71.0,10} \quad n = 41,5 \text{ (dibulatkan menjadi 41 pegawai)}$$

Berdasarkan rumus tersebut maka sampel berjumlah 41 pegawai. Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung terdiri dari beberapa bidang, maka ditentukan sub sampel untuk masing-masing kelompok secara proporsional. Berikut tabel sampel yang sudah dihitung:

Tabel 3.
Sampel Penelitian

No.	Unit Populasi	Populasi	Jumlah
1	Bidang Data dan Informasi	9	5
2	Bidang Rehabilitas Sosial	20	10
3	Sub Bagian Program	4	3
4	Sub Bagian Keuangan	6	5
5	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	4	2
6	Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian	6	5
7	Bidang Pemberdayaan Sosial	13	6
8	UPT Rumah Singgah	9	5
	Jumlah	71	41

Sumber : Penulis setelah diolah

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, observasi dan kuesioner/angket. Peneliti melakukan observasi di Dinas Sosial Kota Bandung. Sementara studi dokumenter atau arsip yang digunakan yaitu peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan juga Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Sosial Kota Bandung 2018-2020. Kemudian peneliti menyebarkan kuesioner atau angket secara proporsional kepada perwakilan per bidangnya di Dinas Sosial Kota Bandung. Sementara pengujian data menggunakan *software* SPSS Versi 25.

Teknik Pengolahan data menggunakan *Skala Likert* untuk pengukuran data dan pengujian instrumen yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas dan analisis deskriptif. Rumus dari Uji validitas dan uji reliabilitas sebagai berikut:

Ujii Validitas

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}}$$

Ujii Reliabilitas

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{V_c^2} \right]$$

Sementara, teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana dan Uji t untuk menguji adakah hubungan antar variabel dan Uji R² untuk menghitung besarnya hubungan antara variabel X (Pengelolaan keuangan daerah) dengan variabel Y (Akuntabilitas Publik). Rumus dari Analisis regresi linear sederhana, Uji t dan Uji R² sebagai berikut :

Analisis Regresi

Linear Sederhana

$$Y = a + bX$$

Ujii t

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Ujii R²

$$Cd = r^2 \times 100\%$$

Hasil Dan Pembahasan

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ialah analisis yang dilakukan untuk menyelidiki kondisi yang sebenarnya dan hasilnya diuraikan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2019) Berikut nilai pada variabel pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.

Tanggapan Responden Mengenai Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah

Dimensi	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Jumlah Klasifikasi	Kriteria	
Pengelolaan Keuangan Daerah	177	194	5	20%-35%	Sangat Tidak Baik
				36%-51%	Kurang Baik
				52%-67%	Cukup Baik
				68%-83%	Baik
				84%-100%	Sangat Baik
Hasil dari tingkat capaian responden pada variabel Pengelolaan Keuangan Daerah				89,84%	
Kategori jawaban responden terhadap variabel Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung adalah Sangat Baik					

Dilihat dari tabel 4 bahwa kategori pada variabel pengelolaan keuangan daerah ialah 89,8% yang mana terletak pada rentang 84%-100% yang mana hasil tersebut dihasilkan melalui penyebaran kuesioner. Maka disimpulkan pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Sosial Kota Bandung dapat dikatakan sudah **Sangat baik**. Sedangkan untuk nilai pada variabel akuntabilitas publik disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.
Tanggapan Responden Mengenai Variabel Akuntabilitas Publik

Dimensi	Skor Terendah	Skor Tertinggi	Jumlah Klasifikasi	Kriteria	
Akuntabilitas Publik	176	184	5	20%-35%	Sangat Tidak Baik
				36%-51%	Kurang Baik
				52%-67%	Cukup Baik
				68%-83%	Baik
				84%-100%	Sangat Baik
Hasil dari tingkat capaian responden pada variabel Akuntabilitas Publik				87,60%	
Kategori jawaban responden terhadap variabel Akuntabilitas Publik pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung adalah Sangat Baik					

Dapat dilihat tabel 5 bahwa kategori pada variabel akuntabilitas publik ialah 87,6% yang mana terletak pada rentang 84%-100% yang mana hasil tersebut dihasilkan melalui penyebaran kuesioner. Maka dapat disimpulkan akuntabilitas publik pada Dinas Sosial Kota Bandung dapat dikatakan sudah **Sangat baik**.

b. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji valid atau tidak valid suatu pertanyaan atau pernyataan dalam bentuk kuesioner yang telah disebar. Dalam pengujian uji validitas menggunakan SPSS versi 25, dan perhitungannya dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} dicari pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan $N=41$, sehingga didapatkan r_{tabel} 0,309. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.
Hasil Uji Validitas

Variabel	No Item	rhitung	rtabel 5%	Kriteria
Pengelolaan Keuangan Daerah	1	0,642	0,309	Valid
	2	0,676	0,309	Valid
	3	0,693	0,309	Valid
	4	0,764	0,309	Valid
	5	0,793	0,309	Valid
	6	0,853	0,309	Valid
	7	0,776	0,309	Valid
	8	0,581	0,309	Valid
	9	0,487	0,309	Valid
	10	0,374	0,309	Valid
	11	0,576	0,309	Valid
	12	0,655	0,309	Valid
Akuntabilitas Publik	13	0,792	0,309	Valid
	14	0,792	0,309	Valid
	15	0,777	0,309	Valid
	16	0,738	0,309	Valid
	17	0,738	0,309	Valid
	18	0,738	0,309	Valid
	19	0,832	0,309	Valid
	20	0,785	0,309	Valid

Sumber: *output SPSS25 (Diolah Peneliti)*

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa pada item pernyataan tiap variabel sudah melebihi nilai rtabel yaitu 0,309 sehingga disimpulkan bahwa item tiap variabel penelitian pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas publik tersebut sudah valid.

c. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan pada pernyataan di dalam kuesioner tersebut apakah konsisten atau dapat diandalkan dan nantinya data tersebut akan dapat dipercaya. Pengukuran uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* dan suatu variabel dikatakan *reliable* jika nilai *Cronbach alpha* > 0,07 (Ghozali, 2016), sedangkan jika nilainya < 0,07 maka data tersebut dikatakan tidak *reliable*. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.
Hasil Uji Reliabilitas

Reliabilitas	Alpha Cronbach's	Batas Reliabilitas	Kriteria
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,886	0,7	Reliabel
Akuntabilitas Publik	0,931	0,7	Reliabel

Sumber: Output SPSS 25 (diolah oleh peneliti)

d. Analisis Korelasi

Analisis Korelasi di sini menggunakan Korelasi Spearman Rank yang biasa digunakan untuk mencari dan mengukur hubungan antara satu variabel bebas (pengelolaan keuangan daerah) dengan satu variabel terikat (akuntabilitas publik). Penghitungan korelasi Spearman Rank ini menggunakan SPSS versi 25 dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8.
Hasil Uji Analisis Korelasi Spearman Rank

Correlations				
			Pengelolaan Keuangan Daerah	Akuntabilitas Publik
Spearman's rho	Pengelolaan Keuangan Daerah	Correlation Coefficient	1.000	.691**
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	41	41
	Akuntabilitas Publik	Correlation Coefficient	.691**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	41	41
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).				

Sumber: output SPSS 25

Tabel 9.
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,20	Sangat Rendah
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Sedang
0,61 – 0,80	Kuat
0,81 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2016, 184)

Dapat dilihat dari tabel 8 hasil perhitungan dengan SPSS Versi 25, diperoleh hasil nilai korelasi antara pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas publik sebesar 0,691. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat karena nilai koefisien korelasi masuk ke dalam rentan 0,60 – 0,799 yang terlihat pada tabel 9. Maka bisa disimpulkan hubungan antara variabel bebas (Pengelolaan Keuangan Daerah) dan variabel terikat (Akuntabilitas Publik) memiliki hubungan yang **kuat**.

e. Analisis Regresi Linier Sederhana

Uji analisis ini dilakukan guna mengetahui keterkaitan hubungan antara satu variabel independen (bebas) dengan satu variabel dependen (terikat). Apabila terdapat perubahan atau peningkatan pada variabel X maka variabel Y akan meningkat secara konstan atau tetap, hubungan tersebut disebut juga hubungan yang bersifat linier. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan SPSS 25 diperoleh hasil:

Tabel 10.
Hasil Uji Regresi Linier

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.873	4.385		.199	.843
	Pengelolaan Keuangan Daerah	.633	.081	.781	7.808	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Sumber: output SPSS 25

Dilihat dari tabel 10 nilai konstanta (a) sebesar 0,873 dan nilai koefisien regresi (b) sebesar 0,633. Maka didapatkan persamaan regresi linier sederhana yaitu : $Y = 0,873 + 0,633X$

Berdasarkan persamaan regresi pada tabel dapat diketahui bahwa :

1. Konstanta bernilai 0,873 yang mana nilai tersebut dapat diartikan jika pengelolaan keuangan daerah (X) nilainya 0, maka akuntabilitas publik (Y) nilainya 0,873.
2. Jika pengelolaan keuangan daerah mengalami kenaikan 1, maka nilai variabel dependen mengalami peningkatan sebesar 0,633.

Maka dapat disimpulkan bahwa, jika nilai pengelolaan keuangan daerah mengalami peningkatan maka nilai dari akuntabilitas publik juga mengalami peningkatan. Sebaliknya jika nilai pengelolaan keuangan daerahnya menurun maka nilai akuntabilitas publik akan ikut menurun. Hal inilah yang disebut sebagai hubungan yang positif.

f. Koefisien Determinasi

Pengujian ini dilakukan untuk memprediksi seberapa besar pengaruh kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini khususnya untuk mengetahui besarnya hubungan antara variabel pengelolaan keuangan daerah dengan akuntabilitas publik. Hasil uji regresi linier diperoleh *output model summary* sebagai berikut:

Tabel 11.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.781 ^a	.610	.600	2.008

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Sumber: output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji determinasi pada tabel 11 diperoleh nilai R Square sebesar 0,610 atau 61%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kemampuan variabel pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi variabel akuntabilitas publik sebesar 61%, sedangkan sisanya 39% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain. Dari tabel juga diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau R yaitu 0,781.

$$Cd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,781)^2 \times 100\% = 61\%$$

Tabel 12.

Interpretasi Nilai Koefisien Determinasi (R²)

0% < KD < 100%	Tingkat Hubungan
82% - 100%	Sangat Tinggi
49% - 80%	Tinggi
17% - 48%	Cukup Tinggi
5% - 16%	Rendah Tapi Pasti
0% - 4%	Rendah Lemah Sekali

Berdasarkan tabel 12 terlihat bahwa nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 61% dan tergolong dalam kategori pengaruh Tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang Tinggi antara Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Publik pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

g. Pengujian Hipotesis (Uji t)

Uji t ini guna menguji diterima atau ditolaknya sebuah hipotesis dan untuk mengetahui adakah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jika terdapat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan jika signifikansi $< 0,05$ (5%). Diketahui nilai t tabel sebesar 2,021 dilihat dari jumlah sampel dan berikut hasil uji t melalui SPSS Versi 25 :

Tabel 13.

Hasil Pengujian Hipotesis t

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error			
1	(Constant)	.873	4.385		.199	.843
	Pengelolaan Keuangan Daerah	.633	.081	.781	7.808	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Sumber: output SPSS 25

Pada tabel 13 diketahui hasil nilai uji t hitung sebesar $7,808 > 2,021$ dan nilai signifikasinya sebesar $0,00 < 0,05$. Maka dari hasil penelitian ini hipotesis yang diterima yaitu “Terdapat pengaruh positif antara variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X) terhadap variabel Akuntabilitas Publik (Y)”.

Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Publik

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan penulis dan dengan bantuan *software* SPSS 25 dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengelolaan keuangan daerah dengan akuntabilitas publik.

Pernyataan dalam kuesioner harus dinyatakan valid agar penelitian ini sesuai kenyataan yang ada dan kebenarannya akurat. Untuk menentukan valid atau tidaknya instrumen tersebut, maka nilai r hitung $>$ nilai r tabel. Sampel $n=41$ dan taraf kesalahan 5% maka diperoleh r tabel 0,309. Maka bisa disimpulkan dalam pengujian validitas ini menunjukkan hasil dari instrumen atau pernyataan per variabel baik dari variabel pengelolaan keuangan daerah dan variabel akuntabilitas publik ini semuanya adalah **valid**. Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui jawaban responden dari kuesioner ini konsisten atau layak untuk dipakai di penelitian selanjutnya. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,7. Berdasarkan nilai reliabilitas untuk kedua variabel sudah melebihi 0,7 maka bisa disimpulkan item instrumen penelitian tersebut dinyatakan **reliabel**.

Berdasarkan hasil uji Regresi Linier Sederhana, didapatkan bahwa nilai konstanta 0,873 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,633. Maka didapatkan persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut: Akuntabilitas Publik (Y) = $0,873 + 0,633 X$. Perhitungan korelasi spearman rank memperoleh hasil nilai koefisien antara anggaran pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas publik sebesar 0,691 yang mana nilai tersebut berada di antara 0,60 – 0,799 yang menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat di antara dua variabel tersebut. Maka hubungan antara variabel independen (pengelolaan keuangan daerah) dengan variabel dependen (akuntabilitas publik) memiliki hubungan yang kuat.

Selanjutnya dilakukan perhitungan rumus koefisien determinasi dan memperoleh hasil sebesar 61% sedangkan sisanya 39% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Berdasarkan nilai persentase tersebut maka adanya pengaruh yang tinggi antara variabel independen yaitu pengelolaan keuangan daerah terhadap variabel dependen akuntabilitas publik. Selanjutnya dilakukan uji T atau uji hipotesis dengan perhitungan uji t hitung sebesar $7,808 > 2,021$ dan nilai signifikasinya sebesar $0,00 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H_a) diterima atau dengan kata lain Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik akuntabilitas publik pada Dinas Sosial Kota Bandung. Sehingga untuk meningkatkan akuntabilitas publik harus dilakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Secara teoritis menurut Dito (2018) kinerja keuangan daerah terkait langsung dengan keefektifan dan efisiensi dari pengelolaan keuangan daerahnya, dalam artian bahwa kinerja keuangan daerah akan semakin baik jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan efektif serta efisien. Sakti dan Masitoh (2018) dalam pengelolaan pemerintah daerah yang akuntabel tidak terlepas dari anggaran pemerintah daerah. Salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang baik, oleh sebab

itu pelaporan keuangan daerah sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini sependapat dengan skripsi Fatrah (2015) yang mana diketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik pada BPKAD Kabupaten Boalemo dengan arah positif. Sependapat juga dengan penelitian jurnal I Made dan Ni Gusti (2019) bahwa hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung dengan nilai koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 72,9%.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Sosial Kota Bandung, hal ini dibuktikan dengan besaran t hitung $7,808 > 2,021$ dan nilai signifikasinya sebesar $0,00 < 0,05$. Adapun besarnya pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Sosial Kota Bandung sebesar 61% sedangkan sisanya 39% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang tinggi antara Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Publik pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung hendaknya terus melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan, karena berdasarkan data realisasi anggaran menunjukkan adanya penggunaan alokasi anggaran yang belum optimal sesuai dengan target anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian Dinas Sosial sebaiknya mengkaji kembali apakah terdapat kesalahan atau kekurangan terhadap program yang disusun, strategi pencapaian program dan program yang telah dilaksanakan karena berdasarkan data realisasi anggaran per sasaran program masih terdapat program yang realisasi anggarannya belum optimal. Sehingga Dinas Sosial Kota Bandung perlu memperhatikan pengelolaan keuangan, yang mana akan berdampak baik bagi akuntabilitas di Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung begitu pula sebaliknya.

Penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar menambah atau mengganti variabel-variabel yang mempengaruhi akuntabilitas publik untuk menghasilkan penelitian baru yang berguna untuk kepentingan instansi pemerintahan, karena hasil R^2 sebesar 61% yang artinya masih ada 39% variabel lain yang mempengaruhi dan dapat dikembangkan. Contohnya dalam hal kinerja pegawai, karena dengan adanya akuntabilitas dalam menyusun anggaran dibutuhkan keterlibatan pegawai untuk menentukan strategi dalam merealisasikan program-program yang telah ditetapkan.

Referensi

- Akbar, R. (2014). Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Publik*, 1-16.
- Aprianto, T. (2017). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Retrieved from Digital Library Unikom: <https://elib.unikom.ac.id>
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (VIII)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ludani, M.M., Tampi, G.B., Pombengi, J.D. (2015). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (29).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Masitoh, F. T. (2018). Pengaruh Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung . *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , 156-170.
- Nasution, D. A. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 149-162.
- Peraturan Daerah Kota Bandung No 7 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah Pasal 2
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota Pasal 1
- Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1
- Rahmayanti, A. (2019). *Pengaruh pengelolaan Keuangan Daerah terhadap akuntabilitas publik pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Bandung*. Retrieved from Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung: <http://digilib.uinsgd.ac.id>
- Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Siregar, M. A. (2017). *Pengaruh pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung tahun 2014*. Retrieved from Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung: <http://digilib.uinsgd.ac.id>
- Suaib, F. M. (2015). *Pengaruh Pengelola Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo (Studi pada BPKAD Kab. Boalemo)*. Retrieved from UNG Repository: <https://repository.ung.ac.id>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyadi, B., Suwarda. D. (2017). *Kebijakan akuntansi akrual pemerintah daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 280
- Wirama, I.M.Y., Wirawati, N.G.P. (2019). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung . *Jurnal Akuntansi*, 17-31.
- Yani, A. (2013). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.